

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu tindakan uaha yang dilakukan oleh manusia mau itu individu ataupun kelompok untuk mencapai keadaan pada taraf hidup yang lebih baik dari berbaai aspek entah itu sosial, ekonomi, mental dan spiritual. Kondisi hidup yang sejahtera pada dasarnya merupakan harapan yang dimiliki oleh setiap individu. Sebagaimana tercantum pada pancasila, indonesia menjadikan kesejahteraan masyarakatnya menjadi salah satu fokus yang kondisinya diusahakan terwujud dalam kehidupan masyarakat. Adapun pengertian kesejahteraan sosial menurut Zastrow dalam (Adi, 2019:9) adalah “Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem nasional tentang berbagai program, manfaat dan layanan yang bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang merupakan hal mendasar untuk memelihara dan mempertahankan suatu masyarakat.”

Definisi diatas menjelaskan kesejahteraan sosial merupakan sistem yang berisikan berbagai program dengan berbagai manfaat serta berbagai layanan yang sasarannya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang dimana hal tersebut merupakan hal dasar agar suatu masyarakat terpelihara dan bertahan. Menurut Haryanto dan Tomagola (1997), menjelaskan bahwa setiap manusia pasti memiliki memiliki kebutuhan dasar (basic needs), dan yang termasuk ke dalam jenis-jenis kebutuhan dasar, yaitu pangan yang merupakan

kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan makan dan minuman, sandang yang merupakan kebutuhan dasar yang berupa pakaian, papan merupakan kebutuhan yang berupa tempat tinggal dan kebutuhan kesehatan (Setiawan, 2017).

Selaras dengan pengertian kesejahteraan sosial yang dikatakan oleh Zastrow, pengertian kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh Friedlander juga mengatakan bahwa kesejahteraan sosial juga merupakan suatu sistem dari pelayanan sosial dan institusi yang merancang bantuan untuk membantu masyarakat dalam mencapai standar hidup serta kesehatan yang baik. Sebagaimana yang dikutip dari Friedlander (1980) dalam Faharudin (2014:9) yaitu sebagaimana berikut:

Kesejahteraan sosial adalah sistem terorganisasi dari pelayanan pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Dapat diketahui dari definisi di atas bahwa kesejahteraan sosial ini merupakan suatu sistem dari berbagai pelayanan sosial serta institusi yang dirancang dan berjalan secara terorganisasi dengan tujuan untuk membantu individu, kelompok serta masyarakat dalam mencapai standar hidup yang baik serta membangun relasi-relasi personal dan sosial sehingga individu, kelompok serta masyarakat tersebut dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki.

Kedua pengertian menurut para ahli di atas mengenai kesejahteraan sudah jelas bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem dari berbagai program pelayanan sosial maupun institusi yang berjalan secara terorganisasi dan memiliki berbagai program serta manfaat yang bertujuan untuk membantu masyarakat entah

itu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup yang lebih baik dengan mengembangkan kemampuan yang dimiliki mereka melalui cara pembangunan relasi personal dan sosial dengan baik sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk memulihkan fungsi setiap orang, kelompok dan masyarakat dalam kehidupan dengan meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Yang mana tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial ini tergambar dalam seluruh rencana kesejahteraan sosial hingga batas tertentu. Kesejahteraan sosial memiliki tujuan yang sebagaimana dijelaskan oleh Fahrudin (2014:10) sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, dalam arti tercapainya standar kehidupan dalam memenuhi kebutuhan dasar pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan mengeksplorasi sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang makmur dan memuaskan.

Kutipan diatas menjelaskan bahwa tujuan dari kesejahteraan sosial ini terfokuskan pada pencapaian standar kehidupan manusia mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan fisik, sosial, dan ekonomi. Dan fokus lainnya yaitu penyesuaian diri dalam meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Kesejahteraan sosial itu sendiri menjelaskan bahwa tujuannya tersebut adalah pengembalian keberfungsian sosial seorang individu maupun kelompok untuk mencapai keadaan yang sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, materi, spirituan, dan sosial serta

diharapkan dapat beradaptasi dengan lingkungannya secara baik. Kesejahteraan sosial ini diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan terstruktur dan terorganisir yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun nonpemerintahan untuk memecahkan permasalahan sosial serta untuk mencapai terwujudnya peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, maupun masyarakat yang lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 yang menjelaskan tentang kesejahteraan sosial, dalam pasal 3 mengatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan memiliki tujuan sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, kualitas, dan kelangsungan hidup.
2. Memperbaiki fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan.

Undang-Undang tersebut dapat dipahami bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan agar individu, keluarga, dan masyarakat mampu untuk meningkatkan kehidupan menjadi lebih baik. Dalam mencapai suatu kemandirian bagi seorang individu, keluarga, maupun masyarakat, sangat diperlukan keberfungsian sosialnya yang dimana seorang individu, keluarga, maupun masyarakat tersebut dapat terganggu keberfungsian sosialnya, maka perlu peningkatan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial yang ada di lingkungan masyarakat.

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan keberfungsian sosial sebagai salah satu pendukung dalam pewujudan kondisi kesejahteraan sosial

bagi masyarakat. Menurut Friedlander dan Apte dalam Fahrudin (2012:12) fungsi kesejahteraan sosial disebutkan sebagaimana berikut :

(1) Fungsi Pencegahan (*Preventive*), Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, siswa dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga sosial baru. (2) Fungsi Penyembuhan (*Curative*), Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi). (3) Fungsi Pengembangan (*Development*), Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung atau tidak langsung (advokasi) dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber daya sosial dalam masyarakat, baik pengembangan kemampuan maupun pengembangan menyelesaikan suatu permasalahan. (4) Fungsi Penunjang (*Supportive*), Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial lainnya.

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kesejahteraan sosial meliputi berbagai fungsi. Mulai dari fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, fungsi pembangunan, dan fungsi penunjang. Keempat fungsi tersebut sangatlah berkaitan dalam mewujudkan keadaan kesejahteraan sosial dimasyarakat.

2.1.4 Komponen-komponen Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki komponen-komponen di dalamnya yang menjadi ciri ciri bidang kesejahteraan sosial dan menjadi pembeda dari bidang-bidang lainnya. Menurut Fahrudin (2014:16-17) komponen-komponen kesejahteraan sosial diantaranya sebagai berikut :

(1) Organisasi Formal, Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/badan sosial yang formal pula. Kegiatan yang dilaksanakan memperoleh pengakuan masyarakat karena memberikan pelayanan secara teratur, dan pelayanan yang diberikan merupakan fungsi utamanya. (2) Pendanaan, Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Mobilisasi dana dan sumber (fund raising)

merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan kesejahteraan sosial karenanya tidak mengejar keuntungan semata-mata. (3)Tuntutan Kebutuhan Manusia, Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia. (4) Profesional, Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis, dan menggunakan metode dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya. (5)Kebijakan/Perangkat Hukum/Perundang-undangan, Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan, dan pengakhiran pelayanan. (6)Peran Serta Masyarakat, Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat. (7)Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa ada data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

Kesejahteraan sosial di sini memiliki tujuh komponen yang didalamnya yang menjadi ciri dari suatu bidang kesejahteraan sosial. Bidang kesejahteraan sosial di dalamnya terdiri dari organisasi formal yang merupakan Upaya kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh organisasi/lembaga sosial formal dalam pemberian pelayanan. Kemudian pada komponen pendanaan yang ada pada bidang kesejahteraan sosial, komponen ini bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab masyarakat yang ada. Pengerahan dana dan sumber keuangan merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian kebutuhan manusia juga merupakan salah satu komponen yang dituntut untuk dipenuhi dalam bidang kesejahteraan sosial. Pemenuhan kebutuhannya tidak hanya dari aspek kebutuhan fisiologisnya saja tetapi sampai pada kebutuhan psikologis dan aspek kebutuhan dasar lainnya. Dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial juga dituntut untuk profesional dalam pelaksanaannya, sesuai dengan kaidah dan ilmiah, terstruktur, sistematis, dan menggunakan metode dan teknik-teknik

pekerjaan sosial dalam praktiknya. Selain itu dalam bidang kesejahteraan sosial masyarakat juga ikut serta berperan dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat. Selain itu dalam bidang kesejahteraan sosial ini haruslah memiliki komponen yang berupa data dan juga informasi yang berguna sebagai penunjang agar pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan dapat efektif dan juga tepat sasaran.

2.2 Tinjauan Pekerjaan sosial

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan merupakan profesi yang memberikan bantuan dan memiliki tujuan usaha untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, entah itu secara perorangan atau sendiri, maupun kelompok yang sarannya dapat berupa keluarga maupun masyarakat . Pengertian pekerjaan sosial juga dijelaskan menurut *National Association of Social Workers* (NASW) dalam (Faharudin, 2014:60) sebagai berikut :

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini. Praktik pekerjaan sosial terdiri atas penerapan profesional dari nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik pekerjaan sosial pada satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut; membantu orang memperoleh pelayanan-pelayanan nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok; membantu komunitas atau kelompok memberikan atau memperbaiki pelayanan-pelayanan sosial dan kesehatan; dan ikut serta dalam proses-proses legislatif yang berkaitan. Praktik pekerjaan sosial memerlukan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia; tentang institusi-institusi sosial, ekonomi, dan kultural; dan tentang interaksi antara semua faktor ini.

Pekerjaan sosial juga didefinisikan sebagai profesi yang mendorong dalam pemecahan masalah sosial dengan menggunakan berbagai teori pengetahuan yang

sesuai dan sistem sumber yang ada dalam memberikan intervensinya dengan lingkungan sekitarnya untuk mengetahui secara jelas serta mendetail tentang permasalahan yang sedang terjadi. Pengertian pekerjaan sosial tersebut menurut *Internasional Federation of Social Workers* (IFSW) dalam (Suharto, 2014:25) sebagai berikut:

Profesi pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, serta perbaikan masyarakat. Menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik (atau situasi) di mana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak azasi manusia dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial.

Kedua definisi diatas menjelaskan bahwa pekerja sosial merupakan suatu profesi yang memberikan bantuan dorongan dalam pemecahan sosial dengan mengembalikan keberfungsian sosial seorang individu maupun kelompok. dalam pelaksanaan praktiknya seorang pekerja sosial tentunya dilakukan secara profesional dengan menerapkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam mencapai suatu tujuan penanganan masalah. Dalam proses pertolongannya, pekerja sosial menggunakan berbagai teori pengetahuan yang sesuai dan sistem sumber yang ada dalam memberikan intervensinya dengan lingkungan sekitarnya untuk mengetahui secara jelas serta mendetail tentang permasalahan yang sedang terjadi. dan dalam penerapan intervensinya seorang pekerja sosial dapat memebrikan intervensi yang berupa membantu orang memperoleh pelayanan-pelayanan nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok; membantu komunitas atau kelompok memberikan atau memberikan atau memperbaiki

pelayanan-pelayanan sosial dan kesehatan; dan ikut serta dalam proses-proses legislatif yang berkaitan.

2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Profesi manapun tentu di dalamnya memiliki deskripsi tugasnya masing-masing. Sama halnya dengan profesi pekerjaan sosial yang dimana pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi yang bertujuan agar seorang individu maupun kelompok dapat berfungsi sosial. Sebagaimana yang dijelaskan Menurut NASW dalam (Faharudin, 2014:66) praktik pekerjaan sosial di dalamnya terdapat 4 tujuan yang diantaranya sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (coping), perkembangan.
- (2) Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan , dan kesempatan-kesempatan.
- (3) Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
- (4) Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Dekripsi diatas dapat dipahami bahwa seorang pekerja sosial memiliki tujuan profesi dalam menolong individu, kelompok maupun masyarakat dalam peningkatan kemampuan seseorang dalam memecahkan serta mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi oleh seorang individu maupun kelompok dengan menghubungkan pada sistem sumber yang ada. Ataupun dengan cara memperbaiki hubungan antara penyandang masalah yang berupa individu maupun kelompok ini dengan sistem sumber yang ada sehingga dapat berjalan secara efektif. Adapun cara lainnya dengan mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial yang ada.

Keempat tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya ada pula tambahan tujuan profesi pekerjaan sosial lainnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Zastrow dalam (Faharudin, 2014:67) yang menambahkan empat tujuan diantaranya sebagai berikut:

(5) Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya. (6) Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi. (7) Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial. (8) Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam

Empat tujuan tambahan pekerjaan sosial yang telah dipaparkan di atas maka dapat kita ketahui bahwa pekerjaan sosial ini memiliki tujuan tambahan yang bertuju pada penghapusan ataupun pengurangan berbagai fenomena permasalahan sosial yang ada di masyarakat seperti kemiskinan, penindasan, maupun ketidakadilan sosial lainnya sehingga kesejahteraan manusia dapat meningkat dan terwujud dengan baik. Selain dari itu pekerja sosial juga dapat melakukan advokasi yang berupa tindakan sosial dan politik guna mengusahakan kebijakan, pelayanan serta sumber agar terbentuknya keadaan yang adil. Dan tujuan lainnya yaitu memajukan praktik profesi pekerjaan sosial yang dilakukan dengan mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan dan keterampilan dalam konteks budaya yang beragam.

2.2.3 Fungsi Pekerjaan Sosial

Praktik profesi pekerjaan sosial tentunya di dalamnya memiliki fungsi. Berbagai fungsi pekerjaan sosial sebagaimana yang dijelaskan menurut Siporin

dalam (Sukoco 1992: 52-54) membagi fungsi dasar pekerjaan sosial menjadi empat bagian sebagai berikut:

1. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamin memadainya standar-standar subsistensi kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang.
3. Meningkatkan kemampuan orang untuk melaksanakan fungsinya secara optimal sesuai dengan status dan peranan mereka di dalam insutusi-institusi sosial.
4. Mendorong dan meningkatkan ketertiban sosial (social order) serta struktur institusional masyarakat.

Penjelasan menurut siporin tersebut mengatakan bahwa fungsi kesejahteraan sosial memiliki empat fungsi yang tujuannya pada keberfungsian sosial. Selain dari empat fungsi tersbut ada pula fungsi pekerjaan sosial lainnya yang dijelaskan dalam (Pujileksono, dkk., 2018:20) sebagaimana berikut :

1. Mengembangkan, mempertahankan dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamin terpenuhinya standar kehidupan yang layak bagi semua orang seperti:
 - a. Mengembangkan sumber daya manusia, dan memenuhi kebutuhan dasar manusia dan keluarganya.
 - b. Mendistribusikan sumber ekonomi dan sosial secara lebih merata.
 - c. Mencegah keterlantaran dan mengatasi kemiskinan, tekanan kerawatan sosial, dan penyimpangan.
 - d. Melindungi individu dan keluarga dari bencana dan kekerasan serta mengusahakan jaminan sosial bagi mereka yang mengalami ketidakmampuan sementara atau tetap (bencana kecelakaan atau kematian).
3. Memungkinkan seseorang berfungsi sosial secara optimal, seperti:
 - a. mengaktualisasikan potensi dan produktivitas individu.
 - b. Menolong seseorang mencapai tingkat kepuasan yang optimal dengan cara meningkatkan kemampuan.
 - c. Melayani individu, keluarga, dan masyrakat untuk mendapatkan dukungan, subtitusi produktif dan pencegahan terhadap berbagai masalah
 - d. Mengintegrasikan individu dengan sistem lingkungan sosial.
4. Memberikan dukungan dan meningkatkan kemampuan tatanan sosial dan struktur institusional masyarakat.

5. Membantu memfungsikan dan mengembangkan pelayanan institusi sosial.
6. Mengimplementasikan standarisasi adaptasi sosial dan perubahan yang terstruktur sehingga tercipta stabilitasi sosial
7. Mencegah dan mengatasi konflik sosial dan masalah sosial.
8. Mengelola dan mengendalikan penyimpangan perilaku dan disorganisasi sosial.

2.2.4 Prinsip Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial tentunya memiliki prinsip-prinsip dasar dalam praktik pekerjaan sosial. Prinsip ini digunakan dalam profesi pekerjaan sosial sebagai pegangan dalam melaksanakan suatu profesi tersebut. Beberapa prinsip dasar pekerjaan sosial menurut Maas dalam (Adi, 2019:84-88) dijelaskan sebagai berikut:

1. **Penerimaan**
Prinsip ini secara mendasar melihat bahwa praktisi berusaha harus berusaha menerima klien mereka apa adanya, tanpa “menghakimi” klien tersebut. Kemampuan praktisi untuk menerima klien (pihak yang membutuhkan bantuan)-nya dengan sewajarnya akan dapat banyak membantu perkembangan relasi antara mereka.
2. **Komunikasi**
Prinsip komunikasi ini berkaitan erat dengan kemampuan praktisi untuk menangkap informasi ataupun pesan yang dikemukakan oleh klien. Pesan yang disampaikan klien dapat berbentuk pesan verbal, yang diungkapkan klien melalui ucapannya. Atau pesan tersebut dapat pula berbentuk pesan non-verbal, misalnya dari cara duduk klien, cara klien menggerakkan tangan, cara klien meletakkan tangan, dan sebagainya. Dari pesan non-verbal tersebut kita bisa menangkap apakah klien sedang merasa gelisah, cemas, takut, gembira, dan sebagai ungkapan perasaan lainnya.
3. **Individualisasi**
Prinsip individualisasi, pada intinya menganggap setiap individu berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga seorang praktisi haruslah berusaha memahami keunikan dari setiap klien. Karena itu, dalam proses pemberian bantuan harus berusaha mengembangkan intervensi yang sesuai dengan kondisi kliennya agar mendapatkan hasil optimal.
4. **Partisipasi**
Pada prinsip ini, praktisi didorong untuk menjalankan peran sebagai fasilitator. Dari peran ini, praktisi diharapkan akan mengajak klien untuk berpartisipasi aktif dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Karena tanpa partisipasi aktif dari klien, maka tujuan dari terapi tersebut sulit untuk tercapai.
5. **Kerahasiaan**
Dalam prinsip ini, praktisi harus menjaga kerahasiaan dari kasus yang sedang ditanganinya. Sehingga kasus itu tidak dibicarakan dengan sembarangan orang yang tidak terkait dengan penanganan kasus tersebut. Praktisi baru

dapat membicarakan kasus tersebut ketika kasus tersebut sedang dibahas dalam suatu tim kerja.

6. Kesadaran diri pekerjaan sosial

Prinsip kesadaran diri ini menuntut praktisi untuk bersikap profesional dalam menjalin relasi dengan kliennya. Dalam arti bahwa praktisi harus mampu mengendalikan dirinya sehingga tidak terhanyut oleh perasaan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh kliennya. Praktisi di sini haruslah menerapkan sikap empati dalam menjalin relasi dengan kliennya.

2.3 Tinjauan Masalah sosial

2.3.1 Pengertian Masalah Sosial

Tatanan masyarakat tentu di dalamnya terdapat berbagai permasalahan yang timbul. Salah satunya permasalahan sosial yang kerap kali ditemukan di lingkungan masyarakat. Masalah sosial ini terjadi menyangkut nilai-nilai serta moral yang ada di masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Gilin dan Gilin dalam (Soekanto, 2018:312) masalah sosial adalah “Masalah sosial merupakan suatu ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau, menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan ikatan sosial.”

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa masalah sosial ini merupakan kepincangan ikatan sosial yang terjadi dikarenakan ada suatu hal atau keadaan yang tidak sesuai pada unsur kebudayaan yang ada di masyarakat maupun suatu kelompok sehingga dapat menjadikan ancaman bagi kehidupan suatu kelompok tersebut ataupun menjadi penghambat dalam pemenuhan keinginan kelompok sosial tersebut.

Masalah sosial ini terjadi akibat dari ketidak sesuaian nilai serta moral yang ada di kelompok sosial serta terganggunya keberfungsian sosial suatu individu

maupun kelompok sehingga tindakan sosial kerap kali dilakukan dalam menangani masalah serta mengubah situasi itu. Adapula pengertian masalah sosial yang didefinisikan oleh para pekerja sosial dalam (Suharto, 2009:151) sebagai berikut “Masalah sosial merupakan terganggunya keberfungsian sosial individu, kelompok atau komunitas sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan, merealisasikan nilai-nilai yang dianutnya, serta menjalankan peran-perannya di masyarakat.”

Definisi masalah sosial diatas dapat dipahami bahwa masalah sosial ini merupakan suatu keadaan yang dialami oleh individu, kelompok, ataupun komunitas yang dimana mereka mengalami disfungsi sosial atau terganggunya keberfungsian sosial sehingga kemampuan mereka dalam pemenuhan kebutuhan, merealisasikan nilai-nilai yang dianut, serta peran sosialnya terganggu.

2.3.2 Klasifikasi Masalah sosial

Masalah sosial dapat timbul akibat dari ketidaksesuaian antara perilaku dengan suatu norma ataupun nilai-nilai yang ada pada tatanan masyarakat. Masalah sosial ini tentunya memiliki akar permasalahan yang menjadi salah satu sumber penyebab masalah sosial tersebut dapat terjadi.

Faktor sumber penyebab masalah sosial tersebut dapat berupa faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, maupun kebudayaan. Sehingga sebuah masalah sosial dapat diklasifikasikan sebagaimana dari faktor-faktor tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan menurut Soekanto (2018:314) dijelaskan bahwa masalah sosial dapat diklasifikasikan dalam empat kategori berdasarkan sumber-sumbernya yang diantaranya yaitu kategori ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan.

Dalam kategori ekonomis permasalahan yang timbul ini bersumber dari faktor ekonomi seperti Kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Kemudian dalam kategori biologis ini contoh sumber permasalahannya dari faktor kesehatan seperti penyakit. Lalu pada faktor bipsikologis contoh sumber permasalahan yang timbul ini dapat berasal dari disorganisasi jiwa, bunuh diri, penyakit saraf, dan sejenisnya. Dan berdasarkan faktor kebudayaan sumber permasalahannya contohnya seperti Perceraian, kejahatan, kenakalan anak, konflik sosial, dan keagamaan.

2.3.3 Pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pengertian PMKS dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang pedoman penndataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, menyebutkan bahwa “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar”.

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa PMKS merupakan seorang individu, kelompok, maupun masyarakat yang keberfungsian sosialnya terganggu, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Seseorang dapat berfungsi sosial apabila seseorang individu, kelompok ataupun masyarakat dapat menjalankan peran tugas-tugas kehidupan maupun peran sosial mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh barlett (1970) dalam Fahaudin (2014:62) menjelaskan bahwa “Keberfungsian sosial

adalah kemampuan mengatasi (coping) tuntutan (demands) lingkungan yang merupakan tugas tugas kehidupan. Dalam kehidupan yang baik dan normal terdapat keseimbangan antara tuntutan lingkungan dan mengatasi kemampuan mengatasi oleh individu.”

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa keberfungsian sosial dapat terwujud apabila tuntutan lingkungan yang dialami oleh seorang individu, kelompok, maupun masyarakat dapat seimbang dengan kemampuannya dalam mengatasi tuntutan tersebut. Apabila tuntutan lingkungan yang dialami melampaui kemampuan seseorang dalam mengatasi tuntutan tersebut maka terjadi ketidak seimbangan anatar keduanya sehingga keberfungsian seseorang tersebut dapat terganggu.

2.3.4 Jenis-Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) memiliki berbagai jenis pengkategorian. PMKS ini kriterianya tidak hanya orang-orang yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya saja. Ada pula kelompok PMKS yang memang permasalahannya berupa keterlantaran psikologis, sosial, maupun poloit. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang pedoman penndataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, PMKS sendiri memiliki 26 jenis kategori di dalamnya, yang diantaranya sebagai berikut :

1. **Anak balita telantar**, adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

2. **Anak terlantar**, adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
3. **Anak yang berhadapan dengan hukum**, adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
4. **Anak jalanan**, adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
5. **Anak dengan Kedisabilitas (ADK)**, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
6. **Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah**, adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
7. **Anak yang memerlukan perlindungan khusus**, adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
8. **Lanjut usia**, telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. **Penyandang disabilitas**, adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
10. **Tuna Susila**, adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian

diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

11. **Gelandangan**, adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12. **Pengemis**, adalah orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.
13. **Pemulung**, adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
14. **Kelompok Minoritas**, adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
15. **Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)**, adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
16. **Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)**, adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
17. **Korban Penyalahgunaan NAPZA**, adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
18. **Korban trafficking**, adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
19. **Korban tindak kekerasan**, adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
20. **Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)**, adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

21. **Korban bencana alam**, adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya
22. **Korban bencana sosial**, adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
23. **Perempuan rawan sosial ekonomi**, adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
24. **Fakir Miskin**, adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
25. **Keluarga bermasalah sosial psikologis**, adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
26. **Komunitas Adat Terpencil**, adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

2.4 Tinjauan Pelayanan sosial

2.4.1 Pengertian Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan salah satu usaha yang dilakukan dalam mewujudkan kondisi kesejahteraan sosial yang ada dimasyarakat. Berbagai macam pelayanan sosial dirancang guna melindungi, memelihara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Definisi dari pelayanan sosial itu sendiri dijelaskan oleh Suharto (2009:154) sebagai berikut “Pelayanan sosial merupakan aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.”

Pejelasan yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa pelayanan sosial merupakan suatu upaya yang dirancang dalam menangani permasalahan sosial dengan sasaran utamanya pada masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Pelayanan sosial ini diberikan pada masyarakat sebagai salah satu bentuk strategi dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Adapula definisi pelayanan sosial lainnya menurut Johnson dalam (Faharudin, 2014:50) yang mengatakan bahwa “Pelayanan sosial didefinisikan sebagai program dan tindakan-tindakan yang mempekerjakan pekerja-pekerja sosial atau tenaga profesional yang berkaitan dan diarahkan pada tujuan-tujuan kesejahteraan sosial.”

Pelayanan sosial didalamnya memerlukan tenaga-tenaga profesional utamanya pekerja sosial profesional yang terlibat didalam sebuah pelayanan sosial. Hal tersebut harus diperhatikan agar suatu pelayanan sosial dapat berjalan dengan efektif dan juga dapat tepat sasaran.

2.4.1 Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial adalah kegiatan yang memberikan dukungan, bimbingan, dan perlindungan kepada individu, kelompok, dan masyarakat agar dapat melaksanakan fungsi sosial dengan baik. Berbagai macam fungsi pelayanan sosial sebagaimana yang disebutkan Fahrudin (2014:54) mengenai fungsi-fungsi pelayanan sosial yaitu:

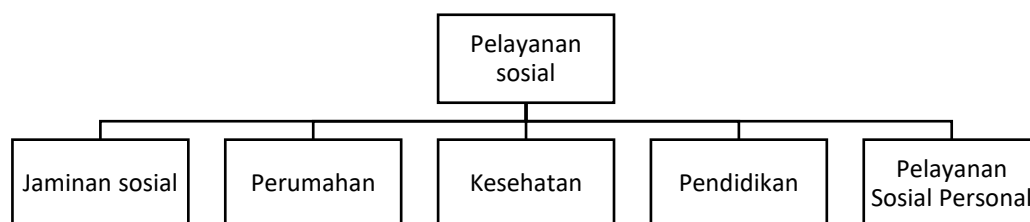
1. Pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan.
2. Pelayanan-pelayanan untuk terapi, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti.
3. Pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi dan nasihat.

Dari poin-poin tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan sosial memiliki empat fungsi yang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan sosial

ditujukan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan bantuan serta pelayanan dengan lebih tepat dalam pemenuhan kebutuhan sehingga mencapai keadaan sejahtera.

2.4.2 Bidang-bidang Pelayanan Sosial

Pelayan sosial didalamnya terdapat berbagai cakupan bidang yang menjadi fokus dalam pelaksanaannya. Dari berbagai bidang tersebut semuanya memiliki perannya masing-masing dalam mewujudkan keadaan yang sejahtera bagi masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan menurut Suharto (2009:155) yang menyatakan bahwa “Di negara-negara industri maju, seperti AS, Inggris, Australia, dan Selandiabar, secara tradisi kebijakan sosial mencakup ketetapan atau regulasi pemerintah mengenai lima bidang pelayanan sosial, yaitu jaminan sosial, pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan atau perawatan sosial personal.”



Gambar 2.1 Bidang-Bidang Pelayanan sosial

Bidang-bidang tersebut dalam suatu negara, biasanya dikelola serta diorganisir oleh lembaga pemerintahan ataupun departemen, seperti departemen sosial, departemen pendidikan, dan berbagai departemen lainnya yang sesuai dengan bidang yang ditanganinya. Tetapi tidak hanya badan pemerintahan saja

yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan sosial ini, badan-badan swasta juga dapat terlibat aktif didalamnya.

Bidang jaminan sosial pada pelayanan sosial ini ditujukan untuk menjamin setiap orang untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, sekurang-kurangnya memiliki pendapatan minimum yang cukup. Kemudian pada bidang perumahan ini merupakan pelayanan sosial yang didalamnya berupa program yang menyediakan perumahan publik atau perumahan sosial yang berisikan bantuan subsidi ataupun bantuan finansial serta pemberian izin dan pengawasan terhadap rumah sewa. Bidang perumahan ini menjadi salah satu fokus dalam pelayanan sosial karena tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu. Fokus pelayanan lainnya yaitu pada bidang kesehatan. Kesejahteraan seseorang tidak hanya dilihat dari faktor pendapatan maupun tempat tinggal saja, melainkan kesehatan seseorang juga menjadi aspek penentu. Pada pelayanan kesehatan ini berupa asuransi kesehatan yang erat kaitannya dengan sistem jaminan sosial, terutama asuransi sosial. Kemudian pada bidang pendidikan. Pemerintah memiliki peran yang wajib dipenuhi. Tiga kewajiban tersebut meliputi penyediaan utama lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, akademi dan universitas. Kemudian pemerintah memiliki kewajiban sebagai regulator pengatur penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta maupun lembaga non-formal. Dan kewajiban ketiga adalah menjadi fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk di dalamnya penyediaan skema beasiswa dan tunjangan pendidikan bagi siswa-siswa yang berprestasi maupun tidak mampu. Dan pada bidang terakhir yaitu bidang pelayanan sosial personal ini di dalamnya merupakan salah satu bidang pelayanan

yang merujuk pada berbagai bentuk perawatan sosial diluar dari pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Pelayanan perawatan yang dimaksud disini seperti perawatan anak, perawatan masyarakat, dan peradilan kriminal. Dan pada bidang ini merupakan salah satu bidang pelayanan pekerja sosial.

2.4.3 HSO (Human Service Organization)

Human Service Organization (HSO) atau dikenal sebagai organisasi pelayanan sosial ini seringkali mengadakan pelayanan sosial. HSO ini merupakan organisasi nonpemerintahan (*non-government organization*) maupun organisasi pihak swasta (*privat organization*) yang memiliki fokus atau perhatian pada masalah-masalah sosial dan masalah-masalah kesejahteraan sosial. HSO didefinisikan Menurut Hasenfeld (1983) dalam Wibhawa, dkk. (2010) bahwa Organisasi pelayanan sosial dapat diartikan sebagai bentuk kumpulan individu-individu yang tergabung dalam suatu organisasi yang fungsi utamanya adalah melindungi, memelihara atau meningkatkan kesejahteraan pribadi individu-individu dengan cara menentukan, menetapkan, merubah dan membentuk ciri-ciri pribadi mereka (W dkk., 2019).

HSO sendiri memiliki tiga tujuan utama dalam penyediaan layanan sosial, yang dijelaskan menurut Schneiderman dalam (Adi, 2019:108-109) adalah “(1) Tujuan kemanusiaan dan keadilan sosial (*humanitarian dan social justice goal*). (2) Tujuan yang terkait pengendalian sosial (*social control goal*). (3) Tujuan yang terkait dengan pembangunan ekonomi (*Economic Development Goal*).”

Dari penjelasan dari tiga tujuan HSO diatas maka dapat kita ketahui bahwa HSO memiliki tujuan dalam pemberian layanan sosial yang terfokuskan pada tiga

poit tersebut. HSO dapat terlibat dalam suatu pelayanan sosial guna mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang sejahtera demi mencapai taraf hidup yang lebih baik. Dalam menjalankan pelayanan tersebut untuk melakukan perubahan pada masyarakat, HSO ini dapat melakukan secara langsung pada komunitas sasaran ataupun dapat melakukannya dengan cara tidak langsung, yaitu dengan menjadi lembaga donor bagi lembaga yang mempunyai program pelayanan langsung pada masyarakat.

2.5 Tinjauan Anak

2.5.1 Pengertian Tentang Anak

Anak dalam pandangan hukum masih belum ada keseragaman dalam pendefinisian. Seperti yang disebutkan dalam UU No.35 tahun 2014 pasal 1 menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Menurut ketentuan Pasal 330 KUHP, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.

pengertian anak Selain dari pandangan hukum, anak juga didefinisikan dari aspek sosiologisnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Beni dalam (Fitriani, 2016) yang menyebutkan bahwa “Anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senang-tiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang

mempunyai setatus social yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi.”

Seluruh pengertian anak yang telah disebutkan di atas, dapat dipaami bawa anak itu merupakan seorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Dan anak yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat yan dimana anak tersebut memiliki posisi sebagai kelompok sosial yang mempunyai setatus social yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Karena anak merupakan individu yangg rawan akan resiko besar dalam mengalami gangguan ataupun masalah dalam perkembangannya, mulai dari aspek psikologi, sosial, maupun fisik (Gultom, 2018). Sehingga perlunya perlindungan bagi anak itu sendiri agar hak-haknya dapat terpenuhi sehingga dapat terwujud keadaan yangg sejahtera bagi anak tersebut.

2.5.2 Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak dapat mudah terwujud apabila anak telah diperlakukan dengan baik. Perlakuan baik yang dimaksud merupakan keadaan dimana anak tersebut kebutuhan dasar serta hak-hak dasarnya telah terpenuhi. kesejahteraan anak dapat dilihat berdasarkan berbagai indikator seperti rasa aman yang dirasakan oleh anak tersebut, kasih sayang yang didapatkan, dan indikator lainnya. Indikator tersebut merupan konsep kesejahteraan serta konsep martabat Sebagaimana yang disebutkan menurut Nasikun (1993) dalam (Fitri dkk., 2015) ada empat indikator dalam konsep kesejahteraan dan konsep martabat yaitu: (1) Rasa aman (*security*), (2) Kesejahteraan (*welfare*), (3) Kebebasan (*freedom*), (4) Jati diri (*Identity*).

Kesejahteraan anak yang ada di Indonesia ini telah diatur dalam berbagai kebijakan serta program oleh pemerintah seperti halnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pada UU Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 ini menyebutkan bahwa Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pada Undang-Undang ini juga membahas terkait hak anak, yang disebutkan pada pasal 2 bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya serta hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

Hak-hak anak sudah seharusnya didapatkan oleh setiap anak yang ada. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi ke dalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak :

1. Hak Gembira
Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
2. Hak Pendidikan
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
3. Hak Perlindungan
Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
4. Hak Untuk memperoleh Nama
Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.
5. Hak atas Kebangsaan

Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).

6. Hak Makanan
Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
7. Hak Kesehatan
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
8. Hak Rekreasi
Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
9. Hak Kesamaan
Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.
10. Hak Peran
dalam Pembangunan Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

ada pula hak dasar anak lainnya selain dari yang telah disebutkan diatas,

sebagaimana yang disebutkan dalam Fitri dkk., (2015) bahwa terdapat 4 hak dasar

anak, yaitu :

1. Hak Hidup
Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.
2. Hak Tumbuh Kembang
Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.
3. Hak Partisipasi
Maksud dari hak partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
4. Hak Perlindungan
Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini

perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Apabila anak telah merasa bahwa kebutuhan dirinya terpenuhi, anak akan merasa sejahtera. Karena tingkat kesejahteraan anak dapat diukur dari seberapa besarnya kebutuhannya terpenuhi seperti halnya hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan ini terpenuhi maka tingkat kesejahteraan anak sudah tercapai.

UU Nomor 4 Tahun 1979 ini di dalamnya juga membahas terkait tanggung jawab orang tua yang menjadi orang yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial kesejahteraan anak. Sebagaimana yang disebutkan dalam undang undang Nomor 4 Tahun 1979 pada pasal 9 bahwa Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Tetapi masih banyak kasus pelanggaran tanggung jawab mereka dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal tersebut. Hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan malah dirampas bahkan pelakunya merupakan orang yang bertanggung jawab atas hak anak tersebut. Maka dibuatlah sebuah sistem yang dinamai sebagai perlindungan anak. Perlindungan anak ini merupakan segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Fitri dkk., 2015)

Perlindungan anak juga dijelaskan dalam UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 pada pasal 1 nomor 2 yang mengatakan bahwa Perlindungan Anak

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2.6 Tinjauan tentang Konsep Diri

Konsep diri ini merupakan cara pandang manusia dalam melakukan penilaian pada dirinya sendiri, dan dihasilkan dari pengalaman yang dihadapi oleh seseorang saat seseorang tersebut menjalani hidupnya (Puspasari, 2007). Konsep diri merupakan penilaian, pandangan, serta evaluasi diri seseorang terhadap dirinya sendiri. Tentunya konsep diri ini juga terbentuk karena adanya interaksi seseorang dengan lingkungan sosialnya. Pada diri anak mengenai konsep tentang diri sendiri semakin jelas ketika ia mengenal dirinya sendiri melalui pandangan guru-guru dan teman-teman sekelas dan ketika ia membandingkan kemampuan dan prestasinya dengan kemampuan dan prestasi teman-temannya (Hurlock, 1980:164). Adapun pengertian mengenai konsep diri ini menurut Brooks dalam (Syam, 2014) menyatakan bahwa:

Konsep diri merupakan semua perasaan dan pemikiran seseorang mengenai dirinya sendiri. Konsep diri meliputi kemampuan, karakter diri, sikap, tujuan hidup, kebutuhan dan penampilan diri. Konsep diri ini dapat berubah-berubah, seseorang bisa saja memiliki konsep diri yang negative dalam waktu lainnya.

Seseorang yang didalam dirinya memiliki konsep diri yang positif tentunya akan pula memiliki perasaan yang positif pula. Dan dari perasaan positif inilah yang dapat berdampak pada perkembangan komunikasi maupun identitas diri yang lebih baik pada diri seseorang. Konsep diri pada seseorang ini tentunya dapat berubah-ubah sebagaimana pengalaman kehidupan yang telah seseorang itu lalui. Pada

seseorang dengan konsep diri yang rendah biasanya seorang tersebut mempresepsikan dirinya sebagai seorang negatif sehingga sikap ataupun yang ditunjukkan oleh orang tersebut kurang baik dalam kehidupannya, seperti pesimis, rendah diri, menarik diri dari pergaulan atau minder, merasa dirinya tidak berguna bahkan seringkali menyalahkan hidup. Orang dengan konsep diri yang rendah ini bisa saja menyalahkan orang lain saat mereka mengalami musibah, mereka beranggapan bahwa orang lain memiliki peran dalam kegagalan diri mereka. Singkatnya, konsep diri merupakan gambaran mental setiap individu yang terdiri atas pengetahuan tentang dirinya sendiri, pengharapan bagi dirinya sendiri dan penilaian tentang dirinya sendiri. Menurut Rahmat dalam (Ghufroon & Risnawitaq, 2017:14) Konsep diri bukan hanya gambaran deskriptif, melainkan juga penilaian individu mengenai dirinya sendiri:

Konsep diri adalah apa yang dipikirkan dan disarankan tentang dirinya sendiri. Ada dua konsep diri, yaitu konsep diri komponen kognitif (*self image*) dan konsep diri efektif (*self esteem*). Komponen kognitif disebut self image dan komponen afektif disebut self esteem. Komponen kognitif adalah pengetahuan individu tentang dirinya mencakup pengetahuan “siapa saya” yang akan memberikan gambaran tentang diri saya, gambaran ini disebut citra diri. Sementara itu, komponen afektif merupakan penilaian individu terhadap dirinya sendiri yang akan membentuk bagaimana penerimaan terhadap diri dan harga diri individu.

Dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan diatas bahwa konsep diri ini merupakan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri yang berdasarkan pada aspek fisik, sosial, ekonomi, intelektual, dan psikologis, yang dihasilkan dari pengalaman kehidupan yang pernah seseorang tersebut lampau melalui interaksi sosial dengan orang lain.

2.6.1 Dimensi Konsep Diri

Konsep diri merupakan persepsi tentang seseorang mengenai dirinya sendiri, hal ini berkaitan dengan penilaian, pengetahuan dan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Dalam konsep diri ini terdapat beberapa dimensi di dalamnya sebagaimana yang dikatakan oleh Calhoun & Accocela dalam (Desmita, 2009) berikut :

1. Dimensi Pengetahuan
Dimensi pengetahuan merupakan apa yang kita ketahui tentang diri sendiri,. Gambaran diri tersebut pada gilirannya akan membentuk citra diri, yang merupakan kesimpulan dari diri kita dalam berbagai peran yang kita pegang. Singkatnya dimensi pengetahuan dari konsep diri mencakup segala sesuatu yang seseorang ketahui tentang dirinya sendiri
2. Dimensi Harapan
Dimensi harapan merupakan dimensi dari konsep diri tentang apa yang dicita-citakan dimasa depan. Penghargaan ini merupakan dari ideal atau diri yang dicita-citakan. Terdiri atas dambaan, apresiasi, keinginan bagi diri kita, atau menjadi manusia seperti apa yang kita inginkan.
3. Dimensi Penilaian
Dimensi dari konsep diri merupakan penilaian kita terhadap diri sendiri. Penilaian diri sendiri merupakan pandangan kita tentang harga atau kewajaran kita sebagai pribadi, setiap hari kita berperan sebagai penilai tentang diri kita sendiri, menilai apakah perilaku kita bertentangan dengan norma-norma yang ada atau tidak.

2.6.2 Komponen Konsep Diri

Konsep diri ini merupakan teori yang berkaitan dengan penilaian diri seseorang terhadap dirinya sendiri. Dan pada teori konsep diri ini terdapat beberapa komponen yang ada di dalamnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh (Hidayat & Uliah, 2015) terdapat lima komponen yang ada pada konsep diri, sebagai berikut:

1. Gambaran diri
Gambaran atau citra diri (body image) mencakup sifat individu terhadap tubuhnya sendiri, termasuk penampilan fisik, struktur, dan fungsinya. Perasaan mengenai citra diri meliputi hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, feminitas, dan maskulinitas, keremajaan, kesehatan, serta kekuatan. Citra mental tersebut tidak selalu konsisten dengan struktur atau

penampilan fisik yang sesungguhnya. Beberapa citra diri memiliki akar psikologi yang dalam.

2. Ideal Diri

Suatu persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku sosial dengan standar, tujuan, aspirasi, atau nilai pribadinya. Perkembangan ideal diri ini dapat terjadi adanya kecenderungan individu dalam menetapkan ideal diri pada batas kemampuannya, adanya pengaruh budaya, serta ambisi dan keinginan melebihi suatu kenyataan yang ada.

3. Harga Diri

Harga diri atau self esteem merupakan penilaian individu tentang dirinya dengan menganalisis kesesuaian antara perilaku dan ide diri yang lain. Harga diri dapat diperoleh melalui penghargaan diri sendiri ataupun dari orang lain. Perkembangan harga diri juga ditentukan oleh perasaan diterima, dicintai, dihormati oleh orang lain, serta keberhasilan yang pernah dicapai individu dalam hidupnya yang sedang dijalani.

4. Peran

Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan oleh masyarakat yang sesuai dengan fungsi yang ada dalam masyarakat atau suatu pola sikap, perilaku, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat misalnya, sebagai orang tua, atasan, teman dekat, dan sebagainya. Setiap peran hubungan dengan penemuan harapan-harapan tertentu. Adapun harapan tersebut terpenuhi, rasa percaya diri seseorang akan meningkat. Sebaliknya, kegagalan untuk memenuhi harapan atas peranan dapat menyebabkan penurunan harga diri atau terganggunya konsep diri.

5. Identitas Diri

Identitas diri merupakan penilaian individu tentang dirinya sebagai suatu kesatuan yang utuh. Identitas menyangkut konsistensi seseorang sepanjang waktu dan dalam sebagai keadaan serta menyiratkan perbedaan atau keunikan dibandingkan dengan orang lain. Identitas seringkali didapat melalui pengamatan sendiri dan dari apa yang didengar seseorang dari orang lain mengenai dirinya.

2.6.3 Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri

Konsep diri seseorang dihasilkan dan terbentuk dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi. Dari faktor yang mempengaruhi konsep diri inilah yang akan membentuk seseorang dalam memiliki konsep diri positif ataupun konsep diri yang negatif. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri seseorang menurut Calhoun & Acocella dalam (Desmita, 2009) adalah sebagai berikut:

1. Orang tua

Orang tua merupakan kontak sosial yang paling awal dan paling dasar. Apa yang di komunikasikan oleh orang tua kepada anaknya lebih mempengaruhi dari pada informasi yang diterima individu dalam kehidupannya. Orang tua sangat berpengaruh dalam pembentukan konsep diri, orang tua seringkali memotivasi kita, mengajarkan kita banyak hal, mengajak kita menerima pengalaman-pengalaman baru, dan banyak lagi yang orang tua berikan dalam kontribusi pembentukan konsep diri seseorang.

2. Teman Sebaya

Penerimaan anak dari kelompok teman sebaya sangat dibutuhkan setelah mendapatkan cinta dari orang lain dalam mempengaruhi konsep dirinya. Jika penerimaan ini tidak datang, dibentak atau dijauhi seperti halnya perundungan maka konsep diri individu akan terganggu. Disamping masalah penerimaan atau penolakan, peran yang diukur anak dalam kelompok teman sebaya sangat mempunyai pengaruh yang dalam pada pandngannya tentang dirinya sendiri.

3. Jenis Kelamin

Siswa, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas akan berkembang bermacam-macam tuntutan peran yang berbeda berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Menjelang masa bebas, begitu banyak tekanan-tekanan sosial yang dialami seseorang dan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan konsep dirinya. Seseorang harus mampu memegang peran penting dalam menentukan bagaimana seharusnya seorang wanita atau pria bertindak atau berperasaan.

4. Harapan-harapan

Harapan-harapan orang lain terhadap diri seseorang sangat penting bagi konsep dirinya. Karena orang lain mencetak kita, dan setidaknya kita pun mengasumsikan apa yang orang lain asumsikan mengenai kita. Berdasarkan asumsi-asumsi itu kita mulai memainkan peran-peran tertentu yang diharapkan oleh orang lain.

5. Suku bangsa

Masyarakat umum terdapat suatu kelompok suku bangsa tertentu yang dikatakan tergolong sebagai kaum minoritas. Biasanya kelompok semacam ini mempunyai konsep diri yang cenderung agresif

Penjabaran faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri diatas menjelaskan bahwa ada lima faktor yang dapat mempengaruhi. Dan faktor faktor yang disebutkan tersebut merupakan faktor general yang dapat mempengaruhi konsep diri seseorang. Tetapi ada pula faktor-faktor khusus yang mempengaruhi konsep diri Pada usia kanak-kanak menurut (Hurlock, 1980:173) sebagai berikut:

1. Kondisi Fisik

Kesehatan yang buruk dan cacat-cacat fisik menghalangi anak untuk bermain dengan teman-teman dan menyebabkan anak merasa rendah diri dan terbelakang.

2. Bentuk tubuh
Anak yang terlalu gemuk atau terlalu kecil menurut usianya tidak mampu mengikuti teman-temannya sehingga mengakibatkan rasa rendah diri.
3. Nama dan julukan
Nama yang mengakibatkan cemoohan atau yang menggambarkan status kelompok minoritas, dapat mengakibatkan perasaan rendah diri. Julukan yang diambil dari kelucuan fisik atau sifat kepribadian dapat menimbulkan rendahh diri dan dendam.
4. Status sosial ekonomi
Kalau anak merasa bahwa ia memiliki rumah yang lebih baik, pakaian yang lebih bagus, dan alat alat bermain yang lebih baik daripada apa yang dimiliki teman-teman sebayanya, ia akan merasa lebih tinggi. Sebaliknya, kalau anak merasa status sosial ekonominya lebih rendah dari teman-teman sebaya, ia cenderung merasa rendah diri.
5. Lingkungan sekolah
Penyesuaian diri yang baik didukung oleh guru yang kompeten dan yang penuh pengertian. Sedangkan guru yang menerapkan disiplin yang dianggap tidak adil oleh anak atau yang menentang anak akan memberi pengaruh yang berbeda
6. Dukungan sosial
Dukungan atau kurangnya dukungan dari teman-teman yang mempengaruhi kepribadian anak melalui konsep diri yang terbentuk. Yang paling terpengaruh adalah anak yang sangat populer dan anak yang terkucil.
7. Keberhasilan dan kegagalan
Berhasil menyelesaikan tugas-tugas memberikan rasa percayaan diri dan menerima diri sendiri. Sedangkan kegagalan menyebabkan timbulnya perasaan kurang mampu. Semakin hebat kegiatannya. Semakin besar pengaruh keberhasilan dan kegagalannya terhadap konsep diri. Kegagalan yang berulang-rulang menimbulkan akbiat yang merusak pada kepribadian anak.
8. Seks
Anak perempuan menyadari bahwa peran-seks yang harus dijalankan lebih rendah daripada peran anak laki-laki, dan kesadaran ini menyebabkan menurunnya penilaian diri. Anak menerima penilaian masyarakat terhadap perannya sebagai sesuatu yang lebih rendah sehingga anak menilai dirinya kurang.
9. Intelegensi
Intelegensi yang sangat berbeda dari yang normal akan memeberikan pengaruh buruk kepada kepribadian. Anak yang intelegensinya kurang dari rata-rata merasakan kekurangan dan merasakan adanya sikap yang menolak

dari kelompok. akibatnya anak menjadi malu, tertutup dan acuh tak acuh, atau anak menjadi agresif terhadap teman-teman yang menolaknya. Anak yang dengan tingkat kecerdasan yang sangat tinggi juga cenderung memiliki konsep diri yang buruk. ini sebagian karena orang tua mengharap terlalu banyak dari anak sehingga ia merasa gagal, dan sebagian lagi karena sikap teman-teman yang kurang pandai.

2.6.4 Jenis-Jenis Konsep Diri

Teori konsep diri ini di dalamnya dikategorika kedalam dua jenis konsep diri.

Ada jenis konsep diri yang positif dan ada pula konsep diri yang negatif. Kedua jenis konsep diri tersebut dijelaskan oleh (Calhoun & Acocella, 1990) sebagaimana berikut:

- a. Konsep diri positif
Konsep diri yang lebih berupa penerimaan diri bukan sebagai suatu kebanggaan yang besar tentang dirinya, dapat memahami dan menerima dirinya sendiri secara apa adanya, evaluasi terhadap dirinya sendiri menjadi positif dan dapat menerima orang lain. Individu yang memiliki konsep diri positif akan merancang tujuan-tujuan yang sesuai dengan realitas, yaitu tujuan yang memiliki kemungkinan besar untuk dapat dicapai, pengetahuan yang luas, harga diri yang tinggi, mampu menghadapi kehidupan didepannya serta menganggap bahwa hidup adalah suatu proses penemuan. Singkatnya, individu yang memiliki konsep diri positif adalah individu yang tahu betul siapa dirinya sehingga dirinya menerima segala kelebihan dan kekurangan, evaluasi terhadap dirinya menjadi lebih positif serta mampu merancang tujuan-tujuan yang sesuai dengan realitas.
- b. Konsep diri negatif
Dalam konsep diri negatif terbagi lagi menjadi dua tipe yaitu:
 1. Pandangan seseorang tentang dirinya sendiri benar-benar tidak teratur, tidak memiliki perasaan kestabilan dan keutuhan diri. Individu tersebut benar-benar tidak tahu siapa dirinya, apa kelemahan dan kelebihanannya atau apa yang ia hargai dalam kehidupannya.
 2. Pandangan tentang dirinya yang terlalu kaku, stabil dan teratur. Hal ini bisa terjadi sebagai akibat didikan yang terlalu keras dan kepatuhan yang terlalu kaku. Disini, individu merupakan aturan yang terlalu keras pada dirinya sehingga tidak dapat menerima sedikit saja penyimpanan atau perubahan dalam kehidupannya.

Penjabaran mengenai konsep diri negatif di atas dapat dipahami bahwa, konsep diri yang negatif terdapat dua tipe yang dimana pada tipe pertama memiliki karakteristik bahwa individu tersebut tidak tahu siapa dirinya dan tidak mengenali

tentang kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Sedangkan pada tipe yang kedua ini memiliki karakteristik yang memandang dirinya dengan sangat teratur dan stabil.

Serupa dengan penjelasan dari pembagian jenis-jenis konsep diri diatas, hal serupa dijelaskan bahwa konsep diri juga terbagi menjadi dua macam pola, pola tersebut diantaranya pola konsep diri yang positif dan negatif. Sebagaimana yang disebutkan oleh Brooks dalam (Rakhmat, 2004:105), menyatakan:

- a. Orang yang memiliki konsep diri positif ditandai dengan :
 1. Yakin akan kemampuan mengatasi masalah
 2. Merasa setara dengan orang lain
 3. Menerima pujian tanpa rasa malu
 4. Menyadari bahwa setiap orang punya perasaan, keinginan dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat
 5. Mampu memperbaiki diri karena sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenangi dan berusaha mengubahnya
- b. Orang yang memiliki konsep diri negatif ditandai dengan:
 1. Peka terhadap kritik
 2. Responsif terhadap pujian
 3. Sikap hiperkritis
 4. Cenderung merasa tidak disenangi orang lain
 5. Pesimis terhadap kompetisi

Selaras dengan yang dikemukakan oleh Brooks, Winarti (2007) juga mengemukakan bahwa orang dengan konsep diri yang positif memiliki berbagai indikator sama dan terdapat beberapa poin tambahan yang diantaranya yaitu :

1. Yakin akan kemampuan dirinya
2. Bersikap terbuka
3. Lancar saat berbicara
4. Cepat tanggap dengan situasi sekitar
5. Merasa setara dengan orang lain
6. Menyadari bahwa tiap orang memiliki perasaan, keinginan dan perilaku tersendiri
7. Mampu memperbaiki diri dengan mengungkapkan aspek kepribadian yang perlu diubah.

Kedua konsep diri tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dengan konsep diri yang positif merupakan orang yang mampu menerima apa yang ada dalam dirinya baik berupa kelebihan maupun kekurangannya. Dan memiliki respon sikap yang baik terhadap saran, kritik, maupun pujian dari orang lain tanpa merasa tersinggung, puas akan keadaan dirinya dan yakin terhadap kemampuan yang dimilikinya dalam menggapai cita-cita.

Orang dengan konsep diri yang negatif ini biasanya menilai dirinya sebagai suatu hal yang negatif. Informasi yang didapatkan tentang dirinya hampir menjadi kecemasan, dan menimbulkan rasa ancaman terhadap dirinya. Seseorang yang dengan konsep diri negatif ini juga memiliki respon yang buruk dengan apapun yang dia peroleh. Respon yang diberikan merupakan perasaan tidak berharga

karena merasa apa yang seseorang tersebut peroleh tidak seberharga dibandingkan dengan apa yang diperoleh orang lain. Seseorang dengan konsep diri negatif ini selalu merasa cemas dan rendah diri dalam pergaulan sosialnya yang dikarenakan kurangnya rasa menghargai diri pribadi dan kurangnya penerimaan terhadap dirinya sendiri.

Kedua jenis konsep diri yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang mendasar anatar konsep diri positif dan konsep diri negatif. Pada seseorang dengan konsep diri negatif ini bisa menjadi faktor penghambat utama dalam perilaku seseorang tersebut dalam memandang diri dan potensi-potensi yang dimiliki orang tersebut secara objektif. Sedangkan prang yang dengan konsep diri yang positif ini memiliki pandangan yang objektif pada kekeurangan serta kelebihan yang dimilikinya maupun orang lain. Seina konsep diri positif ini bukanlah konsep diri yanggg ideal, tetapi berisikan tentan bagaimana seseorang seharusnya dan lebih mengarah pada kesesuaian antara arapan dengan penerimaan teradap keadaan saat ini.

Individu yang mempunyai konsep diri yang positif merupakan orang yang mampu menikmati apa yang ada dalam dirinya baik kekurangan maupun kelebihanannya, mampu menerima saran dan kritik ataupun pujian dari orang lain tanpa merasa tersinggung, puas terhadap keadaan diri dan yakin akan kemampuannya meraih cita-cita.

Konsep diri negatif merupakan penilaian yang negatif terhadap diri. Individu yang mempunyai konsep diri negatif, informasi baru tentang dirinya hampir pasti menjadi kecemasan, rasa ancaman terhadap diri. Apapun yang

diperoleh tampaknya tidak berharga dibandingkan dengan apa yang diperoleh orang lain. Ia selalu merasa cemas dan rendah diri dalam pergaulan sosialnya karena tiadanya akan menghargai pribadi dan penerimaan terhadap dirinya. Jadi orang yang memiliki konsep diri negatif, selalu memandang negatif pada berbagai hal. Ia merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki dalam hidup dan selalu merasa kurang, merasa tidak cukup mempunyai kemampuan untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Individu tersebut merasa rendah dan tidak mau mengakui kelebihan orang lain, ia tidak dapat menerima apabila ada orang lain yang lebih segalanya darinya. Oleh karena itu ia selalu mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang lain. Dari uraian mengenai jenis konsep diri diketahui bahwa terdapat perbedaan mendasar antara konsep diri yang negatif dan konsep diri yang positif.

Konsep diri negatif merupakan penghambat utama dalam perilaku menyebabkan individu tersebut tidak dapat objektif memandang diri dan potensi-potensinya. Konsep diri yang baik adalah konsep diri yang positif, berisi pandangan-pandangan yang objektif terhadap kekurangan dan kelebihan diri. Jadi konsep diri yang positif bukanlah konsep diri yang ideal. Anak yang mempunyai konsep diri yang ideal biasanya merasa tidak puas pada diri sendiri dan biasanya tidak puas pada perlakuan orang lain dan ia cenderung berprasangka dan bersikap diskriminatif dalam memperlakukan pada orang lain, Karena konsepnya berbobot emosi maka itu cenderung menetap dan terus memberikan pengaruh buruk pada penyesuaian sosial anak (Hurlock, 1980:176). Sehingga konsep diri positif ini berisi tentang bagaimana ia seharusnya dan lebih mengarah pada kesesuaian antara harapan dengan penerimaan terhadap keadaannya saat ini.

2.7 Tinjauan tentang Implementasi

2.7.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah merupakan tahap dalam proses penerapan atau pelaksanaan setelah sebuah suatu kebijakan maupun suatu program dirancang atau dirumuskan dengan tujuan yang jelas dan diharapkan tujuan dari suatu kebijakan maupun program tersebut dapat membuahkan hasil sebagaimana yang telah ditentukan. Implementasi ini identik dengan suatu tahap dalam kebijakan publik.

Implementasi ini didefinisikan oleh meter dan horn dalam suaib (2016) bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu berbagai tindakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang dilakukan atau dilaksanakan dan memiliki arahan pada pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Implementasi juga didefinisikan oleh daniel S. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Abdul Wahab (2005) bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang dapat berupa undang-undang, perintah ataupun keputusan yang sumbernya dari eksekutif atau keputusan lembaga peradilan. Biasanya keputusannya berisikan penjabaran masalah-masalah yang ingin diatasi, menjelaskan dengan tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta berragam cara untuk menstrukturkan ataupun mengatur suatu proses implementasi kebijakan tersebut.

2.7.2 Model Implementasi Kebijakan

Implementasi ini identik dengan suatu tahap dalam kebijakan publik, sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Dan dalam ilmu kebijakan sebuah implementasi didalamnya memiliki model yang dapat digunakan. salah satu model implementasi yang dikenal adalah milik george C Edward III. Menurut teori implementasi kebijakan Edward III dalam Agustino (2008), ada 4 empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu antara lain:

1. Komunikasi

Variable pertama yang memiliki pengaruh terkait keberhasilan suatu kebijakan, menurut Edward III yakni komunikasi. Dimana komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi kebijakan. komunikasi ini dapat merupakan sebagai suatu proses penyampain informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dengan maksud agar mencapai tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan yang diharapkan.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi menurut Dunn William N (2009) yaitu Transformasi, Kejelasan, dan Konsistensi. Transformasi yaitu cara penyampaian informasi yang baik kepada para pelaksana kebijakan sehingga dapat menghasilkan implementasi yang baik. Kejelasan yaitu dimana dalam indikator ini informasi yang diterima para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membuat bingung sehingga mereka memahami apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran dari kebijakan tersebut. Dan yang terakhir yaitu konsistensi dimana informasi

yang sudah diberikan kepada pelaksana kebijakan harus dikerjakan secara konsisten dan jelas.

2. Sumber Daya

Edward III mengatakan bahwa sumberdaya merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi suatu implementasi kebijakan terdiri dari:

a. Sumber

Daya Manusia Dalam menjalankan suatu kebijakan sangat bergantung dengan sumber daya manusia yang dimiliki, karena apabila dibandingkan dengan sumber daya yang lain seperti anggaran, material dan lain-lain yang kurang banyak artinya apabila sumber daya manusianya yang mengolah kurang mempunyai rasa profesional yang tinggi atau tidak kompeten.

b. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

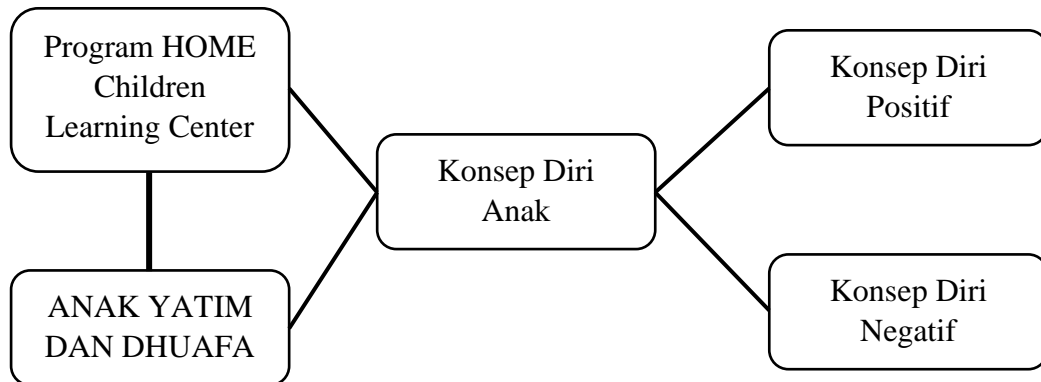
3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dari para pelaksana yang akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh para pejabat tinggi.

4. Struktur birokrasi

Kebijakan ini sangat kompleks sehingga menuntut adanya kerja sama yang melibatkan banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini dapat membahayakan sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

2.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran